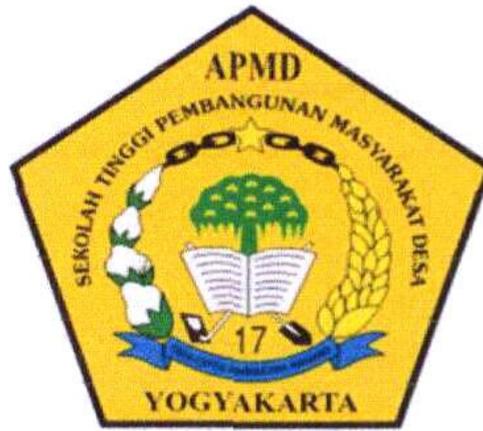


**PENGELOLAAN *COMMON POOL RESOURCES*: MENCARI TITIK
TEMU ANTARA MODAL SOSIAL DAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN BAMBING OPAK ASRI**

SKRIPSI



Disusun oleh

Susana Sinar

NIM: 18520158

JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)

ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN

MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022



**PENGELOLAAN *COMMON POOL RESOURCES*: MENCARI TITIK
TEMU ANTARA MODAL SOSIAL DAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN BAMBING OPAK ASRI**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (SI)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-I)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

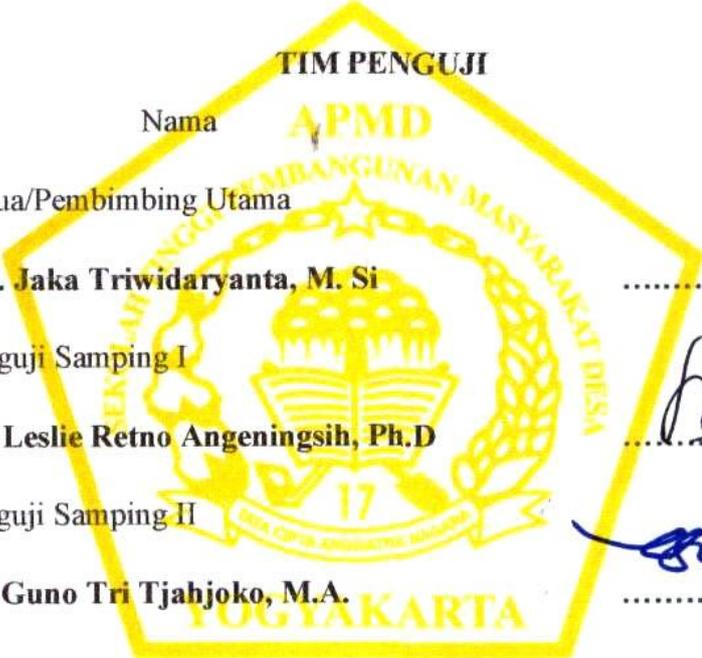
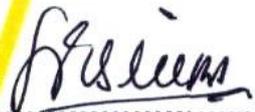
Skripsi ini diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (SI) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

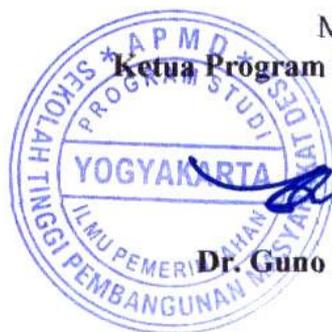
Hari : Senin

Tanggal : 31 januari 2022

Pukul : 11.30-12.30

Tempat : Ruang Ujian Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI		
Nama		Tanda tangan
1. Ketua/Pembimbing Utama Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si		
2. Penguji Samping I Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D		
3. Penguji Samping II Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.		



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susana Sinar

NIM : 18520158

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Pengelolaan *Common Pool Resources*: Mencari Titik Temu Antara Modal Sosial Dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bamping Opak Asri**" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 31 Januari 2022



Susana Sinar

18520158

MOTTO

“Karena tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa, aku tidak bisa apa-apa, dan aku tidak tahu apa-apa”.

I Yohanes 15:5-6

“Senyummu indah. Jiwamu indah. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Yang kamu butuhkan hanyalah belajar untuk terus tumbuh di saat tantangan dunia semakin berat. Berjalanlah tegak, genggam tanganmu sebentar dengan kuat, dan duduklah dengan optimis di pagi hari. Seseorang sangat bersyukur bahwa kamu telah hidup di dunia ini”.

Indra Sugiarto

“Sukses tujuanku, Sekolah caraku”.

Susana Sinar

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini penulis persembahkan *Pertama*, untuk penulis. Terimakasih sudah berani pergi jauh meraih cita-cita. Terimakasih sudah tangguh menimba ilmu dengan sungguh. Untuk Bapa Nikolaus Sambung dan Mama Walburga Muliani dua sosok berharga yang penulis miliki dalam hidup. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup penulis. Terimakasih sudah banyak berkorban, menjadi pelindung, pembela dan mendidik penulis dengan keras. Sekarang penulis memahami makna dari semua didikan keras kalian. Banyak orang telah berbuat baik tetapi bapa dan mama melebihi mereka semua. Untuk kedua Adik penulis Intan dan Lili, semoga tumbuh menjadi yang terbaik dan dua adik yang di surga Andre dan Mark jaga kami selalu. Penulis tidak akan mampu membalas semua cinta kasih yang kalian berikan, dengan karya skripsi ini sebagai bukti bahwa kalian sudah berjuang sungguh, tanpa kalian penulis tidak mampu melakukannya dengan baik dan tepat waktu.

Kedua, untuk Kakak Bruder Frans dan Kakak Mei. Kakak der adalah pemberi semangat dipagi hari, terus mengingatkan untuk tetap tangguh hidup ditanah rantau, mengejar cita-cita dengan semangat dan doa, dan meraih mimpi dengan optimis. Juga untuk kakak Mei. Terimakasih sudah hadir dan menyayangi penulis. Penulis bersyukur Tuhan telah mengirimkan kakak yang baik, menemani kisah kasih penulis dari jauh dan menolong dengan tulus tanpa putus sampai penulis menyelesaikan karya skripsi ini. Tanpa dukungan dan doa kalian karya skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik.

Ketiga, untuk keluarga besar Selek, Rujung, Pede, Mengge dan semuanya. Terimakasih untuk kepercayaan, doa dan dukungan kalian selama ini. Kalian adalah kekuatan terbesar penulis dalam meraih cita-cita.

Keempat, untuk kekasih Stefanus Naor Sirabura. Anda telah menjaga penulis dengan baik sejak tahun 2017 hingga berproses bersama menggapai cita-cita di Kota besar ini. Terimakasih telah mencintai tanpa letih, menjadi sahabat dalam suka dan duka, sahabat diskusi, sahabat merintih ketika dunia terkadang tak

peduli. Sungguh penulis mencintai anda sepenuh hati. Karya skripsi ini juga tidak dapat lahir tanpa ide-ide brilian anda.

Keenam, untuk Dosen, sahabat, dan teman-teman seperjuangan. Terimakasih telah hadir berdiskusi, belajar, dan tumbuh bersama serta menabur kisah dalam hidup penulis. Dengan diskusi dan berdinamika bersama kalian, penulis mampu menyelesaikan karya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Maha Esa yang telah menganugerahkan Cinta Kasihnya dalam setiap langkah dengan penuh kejutan. Cinta kasih-Nya yang besar memberikan kekuatan bagi orang tua sehingga penulis mampu menyelesaikan Karya Skripsi terindah berjudul “Pengelolaan *Common Pool Resources*: Mencari Titik Temu Antara Modal Sosial Dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bamping Opak Asri”.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan benar tanpa dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas dasar itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M. A Ketua program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
3. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Rr. Leslie retno Angeningsih, Ph.D Dosen Penguji I, yang telah menyampaikan kritik dan saran dalam skripsi ini.
5. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. Dosen Penguji II, yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. Hastowiyono, M.S. Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat dalam proses perkuliahan.
7. Dosen-dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mendidik dan membagi ilmu kepada penulis.
8. Bapa Nikolaus Sambung dan Walburga Muliani yang telah memberikan Cinta Kasih dalam doa dan dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Kakak Bruder Frans dan Ka Mei yang telah mendukung dan menyemangati penulis.

10. Keluarga besar Selek, Rujung, Pede, dan Mengge yang telah membantu dan mendukung penulis
11. Teman-teman diskusi di Kelompok Studi Tentang Desa (KESA), teman-teman Stube Hemat, dan teman-teman UKM Katolik STPMD “APMD”, Stube Hemat Yogyakarta, UKM Katolik, UKM Padus, dan UKM Bola. Terimakasih telah berdinamika bersama melalui diskusi dan lainnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis Isna, Tina, Wanti, Tia, Mia, Iren, Ka Putri Laoli, Putri Regita, Ka Ipi, Dina, Nursyamsiah, Wulan, Ibu Dukuh Rizha utami, Ayung, dan Riza.

Yogyakarta, 9 februari 2022

Penulis

Susana Sinar

18520158

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak awal bagi desa sebagai negara kecil untuk berkreasi bagi kepentingan bersama. Dalam Undang-undang Desa ditegaskan bahwa penting untuk melakukan pengembangan sumber daya bersama (*common pool resources*) guna kesejahteraan bersama. Dalam mengembangkan sumber daya bersama (*common pool resources*), desa diberikan kewenangan sehingga memiliki otoritas (kewenangan) dan akuntabilitas mengatur dan mengurus barang-barang publik untuk pelayanan kepada kepentingan masyarakat setempat. Bamping Opak Asri yang merupakan sumber daya bersama (*common pool resources*) Kalurahan Canden harus bermanfaat bagi seluruh masyarakat bersama bukan dikelola secara eksklusif oleh komunitas masyarakat yang dapat menimbulkan *common dilemma* dalam pengelolaannya. Pemerintah Desa yang merupakan pihak yang memperoleh mandat dari masyarakat dapat mengambil bagian dalam menerbitkan kebijakan yang dapat mengatur pengelolaan Bamping Opak Asri sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bersama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berjumlah 11 orang terdiri dari masyarakat komunitas pengelola Bamping Opak Asri, Pemerintah Desa, Masyarakat umum, dan BPD. Objek penelitian yakni Bamping Opak Asri sebagai sumber daya bersama (*common pool resources*) Kalurahan Canden. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data sekunder dikumpulkan melalui buku, jurnal, dokumen, media online dan foto.

Hasil penelitian menjelaskan pengelolaan Bamping Opak Asri dikelola secara eksklusif oleh komunitas masyarakat Padukahan Canden RT 05 dan 06. Sedangkan akses masyarakat umum dibatasi. Hal ini mengakibatkan Bamping Opak Asri menjadi *common dilemma*. Dalam pengelolaan Bamping Opak Asri terjadi penguasaan dan pembatasan akses masyarakat. Hak masyarakat untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari Bamping Opak Asri dibatasi. Dilain sisi masyarakat merasa canggung, malu dan takut untuk memperjuangkan hak mereka atas Bamping Opak Asri. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan Bamping Opak Asri yang dilandasi ikatan sosial (*social bonding*) oleh komunitas pengelola. Dalam kondisi ini, Pemerintah Desa absen terhadap pengelolaan Bamping Opak Asri baik dari aspek kebijakan, kekuasaan, dan kewenangan. Pemerintah Desa hanya fokus pada pembangunan fisik.

Kata Kunci: *Sumber Daya Bersama, Komunitas Pengelola, dan Pemerintah Desa.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kewenangan terkait pengelolaan sumber daya diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, negara memiliki kewenangan untuk mengatur model pengelolaan berbagai sumber daya yang ada. Kelahiran Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mendatangkan harapan dan kekuatan baru bagi desa. Harapan tersebut salah satunya adalah desa mampu mengembangkan sumber daya yang dimilikinya untuk menjadikan usaha produktif dengan diamanatkan melalui Badan Usaha Milik Desa yang akan mengkomodir seluruh sumber daya yang ada.

Namun kurangnya keterlibatan dan komitmen pemerintah desa menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam memanfaatkan sumber daya bersama (*common pool resources*) yang dimiliki desa itu sendiri seperti kosongnya kebijakan dalam bentuk peraturan desa untuk mengatur pengelolaan sumber daya bersama yang adil dan tidak menimbulkan dilema dalam pengelolaannya ditengah masyarakat. Sumber daya bersama (*common pool resources*) merujuk pada bentuk “kepemilikan bersama”. Hal ini mengacu pada konsepsi bahwa sumber daya bersama merupakan milik publik (*public goods*). Hal tersebut berarti semua elemen masyarakat berhak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya

bersama tanpa ada batasan dari siapa pun. Namun, ketika kita melihat dan memperhatikan posisi strategis sumber daya bersama (*common pool resources*) yang merupakan aset penting kehidupan masyarakat serta mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat, negara dalam konteks ini adalah desa seharusnya mampu memberikan sumbangsih yang nyata melalui kewenangannya untuk membuat kebijakan dan menggunakan kekuasaan untuk mengatur pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) sehingga sumber daya bersama yang ada mampu mensejahterakan seluruh masyarakat desa.

Kewenangan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga merupakan tonggak awal bagi desa sebagai negara kecil untuk berkreasi bagi kepentingan bersama. Dalam Undang-undang Desa ditegaskan bahwa penting untuk melakukan pengembangan potensi dan aset desa guna Kesejahteraan bersama. Dalam mengembangkan potensi desa, desa diberikan kewenangan sehingga memiliki otoritas (kewenangan) dan akuntabilitas mengatur dan mengurus barang-barang publik untuk pelayanan kepada kepentingan masyarakat setempat (Eko dkk, 2017). Desa yang merupakan negara kecil atau *pretty state* atau *micro state* (Azar Gat: 2003 dalam Eko dkk, 2014) berfungsi sebagai basis sosial yang merupakan tempat menyemai dan merawat modal sosial dalam hidup berdesa. Berdesa merupakan tindakan untuk melaksanakan tradisi berdesa yang berarti bernegara dan bermasyarakat di ranah desa. Desa menjadi wadah kolektif untuk menjalankan keduanya. Kewenangan asal usul dan kewenangan lokal dalam Undang-undang Desa merupakan instrumen penting untuk melembagakan masyarakat/ melaksanakan tradisi berdesa. Salah satunya

adalah memupuk modal sosial. Lang dan Hornburg (1998), menyatakan bahwa modal sosial umumnya merujuk pada ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat (*stocks of social trust*), norma-norma, jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Modal sosial dapat menjadi kunci utama masyarakat desa dalam menjalankan dan menggerakkan ekonomi di desa. Desa adalah penanggungjawab utama dalam memupuk modal sosial namun terkadang Desa juga tidak mampu untuk menangani sehingga dibutuhkan juga keterlibatan masyarakat desa dalam mengelola modal sosial. Modal sosial dapat dijalankan oleh masyarakat desa dalam menciptakan sebuah usaha dengan tradisi gotong royong yang telah mengakar dan telah menguat ditengah masyarakat desa.

Putnam (1993) maupun Fukuyama (1995) dalam Eko, dkk (2014) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan penopang pembangunan ekonomi dan demokrasi. Hal tersebut terbukti di Padukuhan Canden Kalurahan Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul bahwa modal sosial yang terbina ditengah masyarakat diwujudkan dalam pengelolaan sumber daya bersama (*Common Pool Resources*) yang bernama Bambang Opak Asri. Ini merupakan bentuk bukti bahwa modal sosial yang ada di desa dapat bermanfaat dan memberikan pengaruh positif dalam membangun modal ekonomi masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya bersama (*Common Pool Resources*) tersebut. Desa, melalui Pemerintah Desa seharusnya mampu memetakan secara langsung permasalahan, kepentingan dan kebutuhan serta sumber daya bersama (*Common Pool Resources*) yang dimiliki, sehingga mempermudah menyelesaikan persoalan dan

mewujudkan kesejahteraan bersama. Desa dapat dijadikan sebagai basis ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat karena memiliki aset-aset ekonomi atau sumber daya bersama yang dapat dikelola seperti hutan, kebun, sawah, tambang, sungai, pasar, lumbung, perikanan, kerajinan, dan objek wisata yang bermanfaat untuk sumber penghidupan warga (Eko dkk, 2017). Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya bersama (*Common Pool Resources*) tersebut.

Desa Canden merupakan desa kaya akan sumber daya bersama (*cammon pool resources*). Salah satu sumber daya bersama (*cammon pool resources*) Desa Canden adalah Sungai. Sungai ini terletak tepat di Padukuhan canden. Sungai ini telah menjadi wisata yang biasa disebut Baming Opak Asri. “Baming” artinya pinggiran, “Opak” adalah nama sungai tersebut dan “Asri” adalah indah/ indah dipandang mata. Wisata Baming Opak Asri dibangun pada tahun 2018 sebelum adanya pandemi Covid 19. Wisata Baming Opak Asri ini dibangun swadaya oleh masyarakat Padukuhan Canden berjumlah 30 orang dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat yang berjumlah 30 orang ini bergotong royong menggunakan dana pribadi untuk menciptakan wahana-wahana menarik seperti ayunan, taman bunga, gubuk kecil dan juga perahu yang digunakan untuk berwisata mengelilingi hamparan sungai. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Baming Opak Asri yakni Bapak Sigit, Baming Opak Asri selama aktif cukup banyak memperoleh pengunjung dan telah banyak menghasilkan pendapatan. Terciptanya wisata Baming Opak Asri ini merupakan wujud nyata dari modal sosial masyarakat Padukuhan Canden

yang bertransformasi menjadi modal ekonomi artinya modal sosial yang ada ditengah masyarakat Padukuhan Canden dimanfaatkan untuk membentuk sebuah wisata yang dapat mendukung ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat. Seperti yang disampaikan oleh Lang dan Hornburg (1998) menyatakan bahwa modal sosial umumnya merujuk pada ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat (*stocks of social trust*), norma-norma, jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Modal sosial yang mengakar ditengah masyarakat membentuk menjadi sebuah rasa saling percaya sehingga melahirkan kreativitas yang unik untuk memanfaatkan sumber daya bersama (*common pool resources*) sehingga dapat dikelola dan menjadi modal ekonomi/ pendapatan bagi masyarakat yang diwujudkan nyatakan terbentuknya Bambang Opak Asri.

Namun, dibalik kekuatan modal sosial yang mengakar ditengah masyarakat Padukuhan Canden sehingga mampu menciptakan wisata Bambang Opak Asri, Bambang Opak Asri dikelola secara parsial yaitu *pertama*, hanya oleh dan untuk masyarakat Padukuhan Canden atau komunitas pengelola Bambang Opak Asri sehingga manfaat dari pengelolaan Bambang Opak Asri juga hanya dirasakan oleh masyarakat Padukuhan Canden. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya bersama (*common pool resources*) Desa Canden tidak bermanfaat bagi seluruh masyarakat melainkan hanya sebagian masyarakat karena pengelolaannya hanya dilakukan oleh dan untuk sebagian masyarakat dan manfaatnya pun hanya dirasakan oleh masyarakat Padukuhan Canden/ Komunitas pengelola. *Kedua*, Bambang Opak Asri berpotensi menjadi *common dilemma* atau

berpotensi terjadinya konflik yakni perebutan dan penguasaan di desa. Apabila penggunaan *common pool resources* tidak diatur dan dikelola secara bersama rentan membawa konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Sakro (2020), bahwa sumber daya bersama yang pada awalnya dikelola oleh sebuah komunitas berubah menjadi sebuah tragedi dan konflik di desa dimana desa tidak dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga terjadi perebutan antara desa dan komunitas. Hal ini mengindikasikan Bambang Opak Asri dimasa mendatang akan mengalami konflik atau tragedi jika pengelolaannya tidak diatur dengan jelas dan tidak dikelola secara bersama-sama baik oleh pemerintah desa, masyarakat, maupun elemen lain yang ada di desa. Dalam kondisi ini sumber daya bersama (*common pool resources*) biasanya berpotensi mengalami kemacetan, penipisan, atau degradasi yaitu penggunaan yang didorong melampaui batas hasil yang berkelanjutan (Blomquist dan Ostrom, 1985; Randall, 1983 dalam Wade 1987). Dimasa mendatang Bambang Opak Asri akan menjadi wisata yang besar dan masyarakat yang tidak merasakan manfaatnya akan mempertanyakan bagian mereka sehingga kondisi ini perlu diatur secara jelas agar Bambang Opak Asri dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Desa Canden dan tidak terjadi konflik perebutan antar masyarakat maupun penguasaan oleh pihak-pihak tertentu.

Sumber daya bersama (*common pool resources*) yang ada di desa sudah sepatutnya dikelola oleh desa dengan adil untuk kepentingan masyarakat desa secara umum bukan hanya untuk sebagian kelompok masyarakat. Dalam kondisi ini Pemerintah Desa Canden sebagai pihak yang mendapat mandat dari masyarakat desa belum menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam

membuat sebuah kebijakan yang mengatur secara jelas tentang pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) Baming Opak Asri agar tidak menjadi sebuah *common dilemma* di Desa canden.

Modal sosial yang mengakar ditengah masyarakat Padukuhan Canden telah mampu bertransformasi menjadi sebuah modal ekonomi artinya dari modal sosial yang ada berupa gotong-royong, rasa percaya, dan kerjasama, masyarakat mampu bekerjasama untuk menciptakan sebuah wisata dari sumber daya bersama (*common pool resources*) bernama Baming Opak Asri namun ini akan menjadi sebuah *common dilemma* ditengah masyarakat karena pengelolaan Baming Opak Asri hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Canden yaitu masyarakat Padukuhan Canden serta manfaat dari pengelolaannya pun hanya dirasakan oleh masyarakat Padukuhan Canden. Dalam kondisi ini, pemerintah desa belum secara intensif ikut mengambil bagian dalam pengelolaan Baming Opak Asri dengan perwujudannya sebuah kebijakan yang dapat mengatur pengelolaan Baming Opak Asri sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Canden.

Untuk menuju Desa Canden sejahtera pengelolaan Baming Opak Asri harus melibatkan semua elemen desa, baik Pemerintah Desa, masyarakat, maupun komunitas pengelola, bukan berbasis komunitas atau kelompok masyarakat tertentu sebab sumber daya bersama (*common pool resources*) seutuhnya adalah bermanfaat untuk seluruh masyarakat Desa Canden. Masyarakat telah memiliki modal sosial bahkan telah mengakar kuat ditengah masyarakat dan telah membentuk dan menghasilkan kreativitas yang dapat

mewujudkan modal ekonomi, sehingga dengan kondisi ini pemerintah desa perlu memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan sehingga mampu mengatur secara jelas pengelolaan Bambang Opak Asri bagi semua masyarakat Desa Canden. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang luas dan utuh dalam pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) Bambang Opak Asri namun mengapa sejauh ini hanya dikendalikan oleh sekelompok masyarakat. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi ditengah luasnya kewenangan yang dilimpahkan kepada desa melalui pemerintah desa. Penelitian ini sangat urgen dilakukan untuk mencari titik temu mengenai modal sosial dan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) Bambang Opak Asri Desa Canden.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pengelolaan Bambang Opak Asri diwujudkan sebagai *Common Pool Resources* untuk kesejahteraan warga Desa Canden?
2. Bagaimana relasi Pemerintah Desa, Komunitas pengelola dan masyarakat dalam pengelolaan Bambang Opak Asri?

C. Fokus Penelitian

1. Interaksi warga dari *Common Pool Resource* menjadi *Common Dilema*.

Sumber daya bersama (*common pool resources*) merujuk pada bentuk “kepemilikan bersama”. Hal ini mengacu pada konsepsi bahwa sumber daya bersama merupakan milik publik (*public goods*) yang tersedia secara alamiah. Hal tersebut berarti semua elemen masyarakat berhak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya bersama tanpa ada batasan dari siapa pun. Namun ketika kita melihat dan memperhatikan posisi strategis sumber daya bersama yang merupakan aset penting kehidupan masyarakat serta mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat, negara dalam konteks ini adalah desa seharusnya mampu memberikan sumbangsih yang nyata dalam kewenangannya untuk membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) sehingga sumber daya bersama yang ada mampu mensejahterakan seluruh masyarakat desa.

Hardin dalam artikelnya yaitu "The Tragedy of the Commons" (Hardin 1968) bahwa negara dalam hal ini desa perlu hadir untuk mencegah terjadinya tragedi bersama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*). Hardin (1968) tentang “*The Tragedy of the commons*”, membuka kesadaran mengenai bahaya kelebihan populasi manusia terhadap sumber daya dengan kepemilikan bersama. Tragedi kepemilikan bersama akan terjadi jika individu-individu manusia berupaya mengambil, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan

alam yang menjadi milik bersama dengan prinsip keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga merugikan makhluk hidup lain juga masyarakat yang lainnya karena hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

Bambing Opak yang adalah sumber daya bersama (*common pool resources*) Desa Canden berpotensi menjadi *common dilemma* dalam pengelolaannya. Blomquist dan Ostrom menjelaskan bahwa Commons dilemma timbul dari penggunaan bersama dari sebuah sumber daya alam. Apabila penggunaan *common pool resources* tidak diatur dan dikelola secara bersama rentan membawa konflik. Dalam kondisi ini sumber daya bersama (*common pool resources*) biasanya berpotensi mengalami kemacetan, penipisan, atau degradasi yaitu penggunaan yang didorong melampaui batas hasil yang berkelanjutan (Blomquist dan Ostrom, 1985; Randall, 1983 dalam Wade 1987). Dimasa mendatang Bambing Opak Asri akan menjadi wisata yang besar dan masyarakat yang tidak merasakan manfaatnya akan mempertanyakan bagian mereka.

Bambing Opak Asri berpotensi menjadi *common dilemma* yakni perebutan dan penguasaan oleh komunitas pengelola di Padukuhan Canden karena pengelolaannya hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat dan manfaatnya pun hanya dirasakan oleh masyarakat Padukuhan Canden. Selain itu, Pemerintah Desa belum hadir untuk mengatur pengelolaannya dalam bentuk kebijakan sehingga dapat memanajemen pengelolaan Bambing Opak Asri agar memberi manfaat

bagi masyarakat desa Canden. Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Sakro (2020), bahwa sumber daya bersama yang pada awalnya dikelola oleh sebuah komunitas berubah menjadi sebuah tragedi dan konflik di desa dimana desa tidak dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga terjadi perebutan antara desa dan komunitas. Sumber daya alam yang ada di desa sudah sepantasnya dikelola dengan adil untuk kepentingan masyarakat desa secara umum bukan hanya untuk sebagian kelompok masyarakat.

2. Kehadiran Pemerintah Desa diwujudkan dengan membuat kebijakan tentang pengelolaan Bamping Opak Asri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan adalah hulu dari segala kehidupan bersama, baik pemerintahan maupun masyarakat, karena kebijakan publik menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan dan bagaimana masyarakat berinteraksi dan membangun kehidupannya dalam lingkup lokal, nasional, hingga global. Carl I. Friedrich mendefinisikan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (1963: 79).

Kehadiran pemerintah desa diwujudkan dengan membuat kebijakan tentang pengelolaan Bamping Opak Asri sebagai potensi yang ada di desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa

merupakan pihak yang mendapat mandat dari masyarakat desa untuk melaksanakan kewenangan dalam melayani masyarakat desa. Kewenangan tersebut salah satunya dalam pengelolaan Bamping Opak Asri. Pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Bamping Opak Asri secara intensif karena pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan yang dapat mengatur dengan jelas pengelolaan Bamping Opak Asri sehingga dapat bermanfaat bagi semua masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan *common pool resources*: mencari titik temu antara modal sosial dan pemerintah desa dalam pengelolaan Bamping Opak Asri. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang pengelolaan *common pool resource* Bamping Opak Asri yang berpotensi terjadinya penguasaan oleh pihak tertentu.
2. Mendeksripsikan tentang kehadiran Pemerintah Desa Canden dengan ditertibkan dalam kebijakan pengelolaan Bamping Opak Asri Desa Wisata Canden.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis dan praktis yakni:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini akan memberikan informasi kepada peneliti lain tentang pengelolaan sumber daya bersama yang dilema dan berpotensi pada perebutan antar warga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Desa canden yakni memperoleh rekomendasi tentang pengelolaan Bambang Opak Asri.

F. Literature Review

Beberapa kajian terdahulu membahas pengelolaan sumber daya desa. Pertama, penelitian yang dilakukan Lexy Febrison Malani, Selvie M. Tumengkol dan Juliana Lumintang (2021). Kajian ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi masyarakat Desa Mede, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi masyarakat Desa Mede, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara belum dikelola dengan maksimal. Akibatnya potensi desa belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Desa Mede. Hal tersebut dipengaruhi oleh peran pemerintah desa yang tidak maksimal, yang disebabkan oleh pembagian tugas dan tanggungjawab pemerintah desa yang amburadul, tidak adanya pembinaan dari pemerintah daerah setempat serta sikap egois dan nepotisme pemerintah desa. Faktor lain yang menyebabkan pengelolaan potensi desa tidak maksimal adalah kurangnya pengetahuan pemerintah desa tentang pemberdayaan masyarakat,

sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pengembangan potensi masyarakat desa dan minimnya modal usaha.

Kajian ini hanya membahas peran pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa tanpa memperhatikan faktor-faktor lain seperti modal sosial. Penelitian ini juga belum mengupas tuntas tentang mengapa pembagian tugas dalam Pemerintahan Desa Mede sangat amburadul sehingga menyebabkan pengelolaan potensi desa tidak berjalan maksimal. Penelitian ini hanya mengkaji secara parsial, sehingga tidak menemukan akar permasalahan yang menjadi sebab dari tidak maksimalnya pengembangan potensi desa. Pada penelitian mendatang peneliti akan menggali lebih dalam tentang akar permasalahan pengelolaan sumber daya desa, dalam konteks ini mengenai pengelolaan *common pool resources*: mencari titik temu antara modal sosial dan pemerintah desa dalam pengelolaan Bamping Opak Asri. Bamping Opak Asri lahir disertai dengan proses. Dalam proses ini seharusnya pemerintah desa mengambil peran sebagai bukti hadirnya pemerintah desa dalam mengurus dan mengatur sumber daya bersama yang ada di desa dan memanfaatkan modal sosial yang telah tumbuh ditengah masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya bersama secara adil untuk kesejahteraan bersama.

Berbeda dengan penelitian pertama bahwa potensi masyarakat Desa Mede belum dikelola dengan maksimal yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Fajar Sidik pada (2015) dengan judul Menggali Potensi Lokal Mewujudkan

Kemandirian Desa menunjukkan Desa Wisata Bleberan yang dikenal dengan ikon Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang. Dalam perkembangan dan pelaksanaannya, Desa Wisata Bleberan ini dari tahun 2010-2014 telah memberikan kontribusi pendapatan asli desa (PADes) secara signifikan. Hal ini tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti organisasi desa, kepercayaan, norma dan jaringan dalam mendorong kemajuan desa wisata meskipun pada awal mula pembentukannya, terdapat banyak penolakan dari tokoh agama setempat namun dengan pendekatan kekeluargaan yang sangat baik desa wisata ini pun dapat terwujud. Namun, dalam pengelolaan BUMDes masih dinilai kurang efektif karena pelaksanaannya belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian, upaya pemerintah desa melalui BUMDesa untuk mewujudkan desa mandiri juga menghadapi kendala sosial yang terjadi yaitu munculnya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan, serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan. Sejatinya pelaku ekonomi desa wisata diutamakan warga desa yang berekonomi lemah. Sebab, hal tersebut menjadi tujuan utamanya yakni menyejahterakan warga kurang mampu agar lebih mandiri dan sejahtera.

Penelitian ini memang telah menunjukkan fakta-fakta menarik seperti yang sudah dijelaskan namun penelitian yang dihasilkan belum menelisik jauh mengapa pelaku ekonomi disekitar area wisata berasal dari keluarga dengan

ekonomi mapan, mengapa hal tersebut dapat terjadi, hal tersebut belum ditelisik lebih jauh untuk menghasilkan penelitian yang utuh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Citra Larasati dan Ya'taufiq Kurrahman pada tahun 2019 dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran pemerintah Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang adalah melakukan sosialisasi dan perencanaan pembangunan kawasan wisata Hutan pinus, membentuk POKDARWIS, melakukan promosi pariwisata ke media sosial, dan melakukan studi banding ke desa wisata lainnya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata hutan pinus adalah keadaan alamnya yang terpengaruh saat musim hujan dan keadaan sumber daya manusianya yaitu kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat terhadap pengelolaan Wisata Hutan Pinus sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan secara intensif dari Pemerintah Desa Bendosari. Penelitian ini memiliki kekurangan yaitu belum menunjukkan bagaimana peran pemerintah yang sesungguhnya dalam menangani keadaan alam yang memiliki pengaruh besar bagi keberlangsungan wisata hutan pinus.

Penelitian ini belum menemukan esensi dari peran pemerintah desa dalam pengelolaan hutan pinus namun hanya meneliti tentang keadaan yang ada di desa namun belum menelisik jauh apa peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata hutan pinus bagi dari faktor pendanaan yang akuntabel dan

bagaimana melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan wisata.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh pada tahun 2017 dengan judul Strategi Pengembangan Potensi Desa. Penelitian ini membahas mengenai strategi pengembangan potensi desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi haruslah menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi menuntut kebijakan yang tepat dan tepat dari para pembuat kebijakan dalam upaya mengembangkan potensi wilayah pedesaan. Sudah saatnya menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan menjadikan daerah ini sebagai motor utama penggerak roda perekonomian.

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo pada tahun 2019 dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini mendeskripsikan peran Pemerintah Desa Tlekung dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlekung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes Unit Pengelola Keuangan (UPK) Setya adalah 1) Sebagai fasilitator, 2) Pemerintah Desa Tlekung memberikan asistensi (melakukan pendampingan), mentoring dan coaching terhadap Pengurus BUMDes, 3) Pemerintah Desa mendukung setiap kegiatan yang akan

dilakukan oleh UPK Setya terutama masalah penganggaran, 4) Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan BUMDes, dan 5) Mendorong BUMDes UPK Setya untuk bekerjasama dengan pihak ketiga

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUMDes Unit Pengelola Keuangan (UPK) Setya terdiri atas faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adalah tersedianya sarana prasana penunjang, adanya kebijakan persyaratan untuk menjadi pengurus, adanya pembinaan manajemen yang dilakukan secara rutin, serta pengawasan baik secara internal maupun eksternal, adanya bantuan melalui dana hibah dan adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BUMDes UPK Setya, minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembalian piutang, dan masih minimnya kemampuan pengurus terutama dalam membuat laporan keuangan. Bentuk dukungan pemerintah desa tentunya tidak hanya dukungan dalam bentuk materi namun juga secara ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan bagaimana memajukan sebuah BUMDesa yang tekah ada didesa. Penelitian ini seharusnya lebih jauh mempertanyakan mengapa pemerintah desa sangat aktif dalam memberikan dukungan secara materil misalnya dengan dana hibah dan lain-lain namun krisis dalam berbagi ilmu pengetahuan dan informasi misalnya sosialisasi dan lain-lain yang dapat menjadi bekal masyarakat dimasa mendatang.

Peneliti mengapresiasi penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Strategi Pengembangan Potensi Desa, Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Penelitian terdahulu telah mengupas banyak hal mengenai bagaimana peran pemerintah Desa dalam pengelolaan potensi yang ada di desa meskipun belum secara menyeluruh mengupas tentang mengapa Pemerintah Desa penting secara intensif ikut mengambil bagian dalam pengelolaan potensi desa sehingga penelitian mengenai pengelolaan *common pool resources*: mencari titik temu antara modal sosial dan pemerintah desa dalam pengelolaan Bambang Opak Asri akan melengkapi penelitian terdahulu dan menambah pengetahuan para pembaca. Penelitian ini akan membahas dan melengkapi bagaimana Common Pool Resources berpotensi menjadi sebuah common dilemma jika Pemerintah Desa tidak hadir dalam menerbitkan sebuah kebijakan serta mengabaikan modal sosial yang ada ditengah masyarakat.

G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menjawab persoalan tentang Pengelolaan *common pool resources*: mencari titik temu antara modal sosial dan pemerintah desa dalam pengelolaan Bambang Opak Asri. *Common pool resources* merupakan sumber daya bersama yang harus dikelola dan dimanfaatkan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Pemerintah desa sebagai pihak yang

mendapat mandat dari masyarakat harus mampu mengatur dan mengurus agar hasil yang diperoleh dapat dirasakan masyarakat secara adil. Modal sosial yang tercipta ditengah masyarakat menciptakan sebuah wisata Bambang Opak Asri yang bermanfaat bagi masyarakat namun modal sosial yang tercipta juga akan membentuk sebuah *common dilemma* apabila negara dalam hal ini desa tidak hadir dalam pengelolaannya. Kerangka konseptual ini menghubungkan berbagai konsep yang menjadi jembatan untuk menghasilkan kerangka berpikir untuk menjelaskan tentang Pengelolaan bambing opak asri : mencari titik temu antara modal sosial dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Bambang Opak Asri.

1. Pemerintah Desa hadir dalam pengelolaan Bambang Opak Asri sebagai *common pool resources* dengan aspek kekuasaan, kewenangan dan kebijakan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai penyelenggara, pemerintah desa mendapatkan mandat dari masyarakat untuk melaksanakan kewenangan, kekuasaan, dan membuat sebuah kebijakan yang mendukung kehidupan masyarakat desa. Hal tersebut juga diatur dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa berhak untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengatur serta mengurus

masyarakat desa berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan juga nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat desa.

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak dapat terpisah dari peran sumber daya manusia sebagai subjek dalam melaksanakan roda pemerintahan tertentu. Hal tersebut sama seperti di desa, Pemerintah desa merupakan subjek dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Pemerintah desa sudah sepatutnya memiliki kepekaan mengenai sumber daya bersama (*common pool resources*) di desa yang menjadi peluang bertumbuhnya ekonomi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mendukung dan terlibat secara nyata dalam pengelolaan sebuah sumber daya bersama (*common pool resources*). Desa melalui hak asal usul dan hak lokal desa memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk membuat sebuah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*). Masyarakat desa memanfaatkan sumber daya bersama (*common pool resources*) berdasarkan kewenangan otoritas pengelola dalam hal ini desa. Desa menjadi otoritas pengelola bertujuan untuk mengatur secara jelas dengan memanfaatkan kewenangan yang ada agar tidak terjadi sebuah konflik yang menyebabkan sebuah *common dilemma* dalam pengelolaannya.

Pemerintah Desa harus mampu melihat dan peka serta mampu berpikir kreatif terhadap sumber daya bersama (*common pool resources*) yang dimiliki desa artinya pemerintah desa harus mampu memastikan kebermanfaatannya dari pengelolaan sumber daya bersama dapat dirasakan

oleh semua masyarakat desa. Sumber daya bersama (*common pool resources*) yang ada di desa tentunya menjadi peluang dan kesempatan masyarakat lebih berdaya dengan adanya dukungan dari pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa serta pihak yang memperoleh mandat untuk menjalankan kewenangan, kekuasaan dan pembuatan kebijakan bagi masyarakat desa. Pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) dalam bentuk wisata desa atau desa wisata dapat dijadikan salah satu cara dan inovasi Pemerintah Desa agar dapat mewujudkan kesejahteraan.

Desa wisata merupakan salah satu objek wisata yang sedang bertumbuh dan berkembang di sektor pariwisata. Pada saat ini desa wisata sangat gempar dilaksanakan dan dijalankan oleh beberapa desa di Indonesia. Desa wisata berkembang pada desa yang memiliki karakter serta keunikan khusus seperti sumber daya alam yang masih utuh, tradisi, budaya masyarakat lokal, dan berbagai macam keunikan lainnya. Muljadi (2009: 27) menyatakan bahwa desa wisata merupakan suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun sekaligus melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong rotong. Selanjutnya Fandeli (2012: 171) secara komprehensif menjelaskan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan

suasana yang mencerminkan keaslian desa baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan dapat menjual berbagai atraksi-atraksi sebagai daya tarik wisata. Pengembangan desa wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal merupakan salah satu faktor penting karena masyarakat lokal lebih mengetahui mengenai wisata tersebut namun pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan tentunya harus ikut mengambil bagian dalam pengelolaan wisata yang ada. Bentuk dari keikutsertaan pemerintah desa adalah membuat sebuah kebijakan yang mengatur mengenai wisata yang ada dalam pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) yang ada di desa wisata tersebut sehingga hasil yang diperoleh dari pengelolaan dapat dirasakan oleh semua masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam konteks Desa Canden, wisata yang tercipta adalah Baming Opak Asri. Baming Opak Asri merupakan sumber daya bersama (*common pool resources*) yang ada di Desa Canden. Pengelolaan Baming Opak Asri dilakukan secara eksklusif yaitu hanya dikelola oleh dan untuk masyarakat padukuhan canden RT 5 dan RT 6. Dalam kondisi ini, Pemerintah Desa Canden dapat melibatkan diri secara nyata dalam

pengelolaan Bamping Opak Asri dalam bentuk kebijakan agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat serta mencegah terjadinya konflik dimasa depan.

Sumber daya bersama (*common pool resources*) merujuk pada bentuk “kepemilikan bersama”. Hal ini mengacu pada konsepsi bahwa sumber daya bersama merupakan milik publik (*public goods*) yang tersedia secara alamiah. Hal tersebut berarti semua elemen masyarakat berhak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya bersama tanpa ada batasan dari siapa pun. Ostrom (1990) mendefinisikan sumber daya bersama (*common pool resources*) merupakan sumber daya yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat seperti hutan, air, sungai, dan gunung. Sedangkan Robert Wade (1987) mendefinisikan sumber daya bersama (*common pool resources*) merupakan barang yang digunakan oleh banyak orang seperti kanal, irigasi dan padang gembala. Pada konteks Indonesia, kewenangan terkait pengelolaan sumber daya diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, negara memiliki kewenangan untuk mengatur model pengelolaan berbagai sumber daya yang ada. Bamping Opak Asri merupakan sumber daya bersama (*common pool resources*) Desa Canden yang seharusnya dikelola dengan intensif oleh Pemerintah Desa Canden untuk kesejahteraan bersama. Melihat dan memperhatikan posisi strategis

sumber daya bersama yang merupakan aset penting kehidupan masyarakat serta mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat, Negara dalam konteks ini adalah Desa seharusnya mampu memberikan sumbangsih yang nyata dalam kewenangannya untuk membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) sehingga sumber daya bersama yang ada mampu mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Apabila penggunaan sumber daya bersama (*common pool resources*) tidak diatur dan dikelola secara bersama berpotensi menghasilkan sebuah konflik. Dalam kondisi ini sumber daya bersama (*common pool resources*) biasanya berpotensi mengalami kemacetan, penipisan, atau degradasi yaitu penggunaan yang didorong melampaui batas hasil yang berkelanjutan (Blomquist dan Ostrom, 1985; Randall, 1983 dalam Wade 1987).

Namun Pemerintah Desa Canden saat ini belum menerbitkan satu kebijakan yang dapat mengatur pengelolaan Bamping Opak Asri, hal ini mengakibatkan sumber daya bersama (*common pool resources*) menjadi sebuah *common dilemma*. Modal sosial yang mengakar ditengah masyarakat mampu bertransformasi menjadi sebuah komunitas pengelola wisata namun hasilnya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat, dimana kehadiran Pemerintah Desa? Sebagai pihak yang memperoleh mandat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan yang sehingga manfaat dari Bamping Opak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Canden. Kondisi ini berpotensi untuk

menjadi sebuah konflik dan atau perebutan dimasa depan karena sebagian masyarakat akan bertanya bagian mereka. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus mengambil peran penting dalam pengelolaan Bambang Opak Asri sebagai sumber daya bersama (*common pool resources*) Desa Canden.

2. Penggunaan bersama terhadap Bambang Opak Asri dengan pemanfaatan modal sosial.

Lang dan Hornburg (1998) menyatakan bahwa modal sosial umumnya merujuk pada ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat (*stocks of social trust*), norma-norma, jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Modal sosial dapat menjadi kunci utama masyarakat desa dalam menjalankan dan menggerakkan ekonomi di desa. Desa adalah penanggungjawab utama dalam memupuk modal sosial namun terkadang Desa juga tidak mampu untuk menangani sehingga dibutuhkan juga keterlibatan masyarakat desa dalam mengelola modal sosial. Modal sosial dapat dijalankan oleh masyarakat desa dalam menciptakan sebuah usaha dengan bergotong royong yang telah mengakar dan telah menguat ditengah masyarakat desa.

Dalam konteks Desa Canden, masyarakat Padukuhan Canden telah memiliki modal sosial yang tinggi sehingga mampu melahirkan sebuah kreativitas untuk membuat Bambang Opak Asri. Pemerintah Desa yang adalah mandat masyarakat dapat lebih jeli dan peka untuk melihat

sumber daya bersama (*common pool resources*) yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena ketidakpekaan Pemerintah Desa, masyarakat mengambil alih untuk mengelola sumber daya bersama (*common pool resources*) Bambang Opak Asri sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat memiliki kepercayaan satu sama lain dan merasa memiliki persoalan yang sama yaitu ingin meningkatkan pendapatan mereka untuk kesejahteraan kehidupan sehingga mereka berusaha untuk mengelola Bambang Opak Asri. Pemerintah desa sebagai mandat masyarakat seharusnya lebih menyadari untuk mengelola Bambang Opak Asri khususnya dalam membuat kebijakan yang mampu mengatur pengelolaan Bambang Opak Asri agar efektif demi kesejahteraan bersama.

Modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan diberbagai sektor ekonomi seperti yang disampaikan oleh Fukuyama (1999) menunjukkan sebuah hasil-hasil studi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Fukuyama, Hasbullah (2006) memberikan contoh perkembangan ekonomi yang sangat tinggi di Asia Timur yang dijalankan pelaku ekonomi cina. Usahanya memiliki tingkat kohesifitas yang tinggi karena dilakukan dengan koneksi-koneksi kekeluargaan dan kesukuan,

dan pola ini mendorong pembentukan jaringan rasa percaya (*networks of trust*) yang dibangun batas-batas keluarga, suku, agama, dan negara. Budaya gotong-royong, tolong-menolong, saling mengingatkan antar individu dalam entitas masyarakat desa merefleksikan semangat saling memberi (*reciprocity*), saling percaya (*trust*), dan adanya jaringan-jaringan sosial (*social net working*).

Pembangunan industri pada masyarakat dengan modal sosial tinggi akan cepat berkembang karena modal sosial akan menghasilkan energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menumbuhkembangkan dunia usaha. Modal sosial berpengaruh kuat pada perkembangan sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, jasa, konstruksi, dan pariwisata. Seperti yang terlihat di Padukuhan Canden Desa canden, modal sosial yang terjalin antar masyarakat menyebabkan terciptan hubungan timbal-balik yang menciptakan adanya kreativitas untuk membangun wisata Baming Opak Asri berdasarkan sumber daya bersama (*common pool resources*) yang ada.

Modal sosial memiliki peran sebagai tenaga penggerak dalam berbagai tindakan sosial. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Brehm dan Rahn (Winarni, 2011) bahwa modal sosial dapat didefinisikan sebagai jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. Peran modal sosial dapat menyerahkan tanggung jawab kepada individu dalam suatu

kelompok yang kemudian akan memunculkan keeratan antar kelompok masyarakat yang lebih efisien sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan (Yustika, 2013).

Berangkat dari kesamaan persoalan ditengah masyarakat, masyarakat menyadari hal tersebut dan melahirkan sebuah kreativitas untuk memanfaatkan modal sosial yang diwujudkan dalam rasa saling percaya, kesetiakawanan, kepedulian bersama, dan dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama. Modal sosial yang ada diharapkan mampu menemukan solusi agar keluar dari persoalan yang ada. Solusi tersebut diwujudkan dengan lahirnya wisata Bambang Opak Asri yang akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) sesungguhnya merupakan peran Pemerintah Desa sebagai mandat masyarakat untuk melakukan fungsinya dalam mensejahterahkan masyarakat, namun seperti yang disampaikan diatas ketika pemerintah desa tidak mampu untuk melihat dan memanfaatkan sumber daya bersama yang ada maka masyarakat berhak untuk melakukannya demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri meskipun pada akhirnya hasil dan manfaat dari wisata sumber daya bersama (*common pool resources*) Bambang Opak Asri hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini akibat dari lambannya respon dan ketidakpekaan pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya bersama (*common pool resources*) sehingga menjadi sumber pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan kehidupan

bersama. Sumber daya bersama (*common pool resources*) berada di desa bukan milik privat atau komunitas melainkan dikuasai negara sehingga Desa berhak untuk mengelola dan mengurus sumber daya bersama (*common pool resources*) dalam membuat sebuah kebijakan yang mendukung proses pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*). Kebijakan yang ada juga harus mampu memberikan perlindungan dan kesempatan kepada semua masyarakat dalam pemanfaatan Bamping Opak Asri. Pemerintah desa, masyarakat, maupun komunitas pengelola harus bekerjasama bahu-membahu dalam mengelola sumber daya bersama (*common pool resources*) ini. Pemerintah desa sebagai pihak yang memperoleh mandat masyarakat harus mampu mengambil bagian dalam menjembatani pengelolaan dengan membuat sebuah kebijakan yang mendukung pengelolaan dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) sehingga komunitas maupun masyarakat desa canden dapat merasakan secara adil kebermanfaatn sumber daya bersama (*common pool resources*) dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah cara untuk menjawab dan menjelaskan suatu masalah secara ilmiah. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan metode yang sesuai dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai alat untuk memperoleh fakta-fakta dilapangan sehingga menghasilkan

sebuah penelitian yang ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut, Hadari Nawawi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan daftar yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. (Hadari Nawawi, 1991:63). Sebelum melakukan penelitian lapangan, terlebih dahulu penulis memanfaatkan buku, jurnal, dan media online untuk digunakan dalam merangkai atau menyusun kerangka berpikir secara teoritik dalam penelitian sehingga, memperoleh pintu masuk dalam berargumentasi untuk menjelaskan Pengelolaan Bambang Opak Asri: Mencari Titik Temu Antara Modal Sosial Dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bambang Opak Asri dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pertama, observasi. Dalam pengertian psikologi observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Hal ini dapat dipahami bahwa observasi merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap sebuah objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Kalurahan Candan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimulai dari awal bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan akhir bulan Januari tahun 2022 dengan ini penelitian dilakukan oleh peneliti kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 19 Mei 2021, 19 Juni 2021, dan 22 Juni 2021 peneliti mengikuti kegiatan Wira Desa pada lokasi penelitian disamping itu, peneliti mulai mengumpulkan informasi awal mengenai Bambang Opak Asri dan 7 Oktober 2021, peneliti melakukan

kunjungan pada wisata Bambang Opak Asri serta menemukan informasi mengenai Bambang Opak Asri dikelola oleh komunitas.

Kedua, wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data serta informasi dari terwawancara (Arikunto, 1993:126). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dan juga melalui telpon maupun whatsApp dengan panduan wawancara yang telah disiapkan. Narasumber atau subjek penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan Canden (1 orang), Pengurus Bambang Opak Asri (1 orang), dan masyarakat (4 orang), BPD (2 orang) dan Dukuh (3 orang). Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh data yakni pertama, Bambang Opak Asri dikelola oleh komunitas secara eksklusif. Kedua, Pemerintah setempat absen terhadap pengelolaan Bambang Opak Asri dengan ketiadaan peraturan kalurahan (PERKAL) yang mengatur pengelolaan Bambang Opak Asri. Akibat pengelolaan yang eksklusif dan ketiadaan kebijakan dari pemerintah setempat, Bambang Opak Asri berpotensi menjadi *Common* dilema. *Common* dilema timbul seperti penguasaan dan pembatasan terhadap masyarakat umum oleh komunitas pengelola.

Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya adalah barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 1993: 131). Berikut adalah rangkuman yang terdiri dari

aspek, jenis data yang dikumpulkan, strategi pengumpulan data, dan kedudukan data pada analisis penelitian yakni:

Aspek	Jenis Data yang dikumpulkan	Strategi Pengumpulan Data	Kedudukan Data pada Analisis Penelitian
Observasi	Aktor-aktor yang terlibat dan objek wisata Bamping Opak Asri	Pengamatan langsung	Memberikan gambaran yang realistik tentang perilaku maupun objek penelitian
Wawancara	Wawancara Mendalam	Menggunakan panduan wawancara	Data utama dan mempertegas observasi dan dokumen
Dokumentasi	Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait	Strategi pengumpulan dokumen dilakukan dengan mengunjungi pihak terkait untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.	Menganalisis lokasi penelitian misalnya profil desa dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi ini dilakukan dengan strategi sesuai dengan kedudukan dalam menganalisis data. Pertama, observasi. Observasi dilakukan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan Bamping Opak Asri dan objek wisata Bamping Opak Asri. Strategi yang dilakukan dalam observasi ini yakni secara langsung artinya peneliti melihat dan mengamati secara langsung objek wisata Bamping Opak Asri. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang realistik tentang perilaku aktor maupun kondisi objek penelitian.

Kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan strategi yakni menggunakan panduan wawancara sebagai pedoman dalam melakukan tanya

jawab antar peneliti dan narasumber atau subjek penelitian agar memperoleh data yang sesuai dengan kondisi objek penelitian. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait penelitian dengan strategi yakni mendatangi pihak-pihak terkait untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan agar dapat menjadi alat dalam menganalisis kondisi objek penelitian. Dokumen yang diperoleh dari pemerintah setempat atau pihak terkait yakni dokumen RKPDESA tahun 2021 dan Buku Monografi Jilid II tahun 2022. Setelah semua data terkumpul mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan kerangka konseptual yang ada.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN CANDEN, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL, DIY

A. Deskripsi Desa

Sejarah berdirinya Kalurahan Canden diawali dengan adanya penggabungan dari tiga kelurahan yang ada pada waktu itu yaitu disebelah utara adalah kelurahan Sanggrahan yang terbentuk sebelum tahun 1933, kemudian disebelah tengah yaitu kelurahan Suren dan disebelah selatan adalah kalurahan gadungan. Pada perkembangannya ketiga kelurahan tersebut digabung menjadi satu pada 26 November 1946 menjadi Desa Canden. Kalurahan Canden berdiri pada tahun 1946, dengan luas wilayah 5.361.455.0 Ha dengan tipologi desa yaitu persawahan. Memiliki luas tanah kas desa sebesar 73.2330.0 Ha yang mempunyai tingkat perkembangan desa swakarya. Selain itu Desa Canden memiliki sebuah desa wisata yang dinamakan Bendungan Tegal yang merupakan bendungan yang menghubungkan pertemuan antara kali opak dan kali oya, bendungan tegal didirikan pada tahun 1996. Jarak tempuh dari pusat kota Yogyakarta kurang lebih 15 km sedangkan jarak tempuh dari pusat pemerintahan kota Bantul kurang lebih 7 km dari Desa Canden. Berikut ini merupakan wilayah Desa Canden Kecamatan Jetis. Pada Peta dibawah ini menunjukkan bahwa Desa Canden berada di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.



Kalurahan Canden terletak sebagian besar berbentuk pegunungan dan perbukitan, terdapat bentangan sawah yang sangat luas yang dimanfaatkan sebagai petani, sebagian besar penghasilan Kalurahan Canden adalah dengan menanam padi, singkong, dan sawah tadah hujan. Sebagian lagi warga/masyarakat Kalurahan Canden sebagai peternak sapi, domba dan ayam kampung. Ketinggian tempat pada masing-masing wilayah umumnya tidak

sama yaitu antara 10-300 meter. Dengan perincian kemiringan tanahnya 24% dari luas wilayah Kalurahan Canden. Berdasarkan bentuk tata letak alam dan penyebaran geografisnya dapat digolongkan bagian utara, terdiri dari bentangan sawah, bagian timur dan selatan pengunungan yang relatif curam, sedangkan bagian tengah dan barat relatif datar dan sedikit bergelombang.

Sejak ditetapkan menjadi Desa Canden pada tahun 1946 hingga sekarang, Desa Canden telah dipimpin oleh 6 kepala desa. Pertama, Kepala Desa Darmoredjo periode 1946 sampai dengan 1988. Kepala Desa pertama yaitu Darmoredjo memimpin Desa Canden selama 42 tahun. Masa kepemimpinan Kepala Desa pertama Desa Canden merupakan kepemimpinan yang paling panjang. Kedua, Kepala Desa Mujilan, BA periode 1989 sampai dengan 1998. Masa kepemimpinan Kepala Desa kedua Mujilan, BA yakni 9 tahun. Ketiga, Kepala Desa H.S. Parjo, BA periode 1998 sampai dengan 2007. Masa kepemimpinan Kepala Desa ketiga H.S. Parjo, BA yakni 9 tahun sama seperti masa kepemimpinan Kepala Desa yang kedua. Keempat, Kepala Desa periode 2008 sampai dengan 2014. Kelima, Kepala Desa Subagio Hadi dan Keenam adalah Lurah Beja yang saat ini sedang memimpin Kalurahan Canden.

Tabel 1.0 Nama-nama Kepala Desa Canden periode 1946-sekarang.

No	Nama	Masa Kepemimpinan	Keterangan
1	Darmoredjo	1946-1988	Pertama
2	Mujilan, BA	1989-1998	Kedua
3	H.S. Parjo, BA	1998-2007	Ketiga
4	Supanto, SE	2008-2014	Keempat
5	Subagiohadi	2008-2019	Kelima
6	Beja, S.H.,M.H,Li	2020-2026	Keenam

Sumber: Hasil wawancara bersama Perangkat Desa Canden

Kepala Desa yang memimpin dari setiap periode dipilih dengan prinsip demokrasi dan atau kegiatan politik. Proses pemilihan menghasilkan pergantian Kepala Desa dan atau mempertahankan kepemimpinannya. Dinamika demokratisasi yang dijalankan memiliki dua makna yang terjadi yakni pertama, dari segi struktural. Segi struktural dimaknai terkait prosedur dan mekanisme penetapan sebuah keputusan yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Kedua, segi kultur atau budaya, yang berkaitan dengan pengenalan, kebiasaan, dan nilai-nilai demokrasi yang telah lama hadir dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Seorang Kepala Desa dapat menjadikan budaya yang telah ada untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan maksimal dengan acuan budaya dan nilai-nilai demokrasi yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat desa karena pada dasarnya dimasa silam ketika belum ada kolonialisme dan negara, desa merupakan kesatuan masyarakat adat (self governing community) yang dikelola berdasarkan pranata lokal. Dalam

konteks paternalisme yang sangat kuat, Kepala Desa adalah tetua desa yang mempunyai posisi sangat kuat dalam menjalankan fungsi melindungi dan menyejahterakan warga desa. Karena itu fungsi sosial-ekonomi merupakan karakteristik dasar fungsi Kepala Desa.

B. Keadaan Geografis

Luas wilayah Kalurahan Canden sebesar 5.361.455,00 Ha yang terdiri dari wilayah untuk perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan besar, serta jasa dan perdagangan. Secara administratif Kalurahan Canden terdiri dari 15 Padukuhan yakni Pulokadang, Kralas, Canden, Plembutan, Gatén, Beran, Suren Wetan, Suren Kulon, Gadungan kepuh, Gadungan Pasar, Banyudono, Wonolopo, Ngibikan, Kiringan, dan Jayan dengan jumlah rukun tetangga (RT) yakni 76 RT. Kalurahan canden memiliki batas-batas administratif yang berbatasan langsung dengan 4 Desa. Sebelah utara kalurahan Canden berbatasan dengan Desa Sumber Agung, Jetis. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Srihardono, Pundong. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Patalan, Jetis dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebon Agung, Imogiri.

C. Kondisi Sosial Masyarakat Kalurahan Canden

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kondisi diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi. Sedangkan kondisi sosial masyarakat diartikan sebagai keadaan masyarakat suatu Negara pada satu saat tertentu (Kamus

Umum Bahasa Indonesia, 2000:502). Jadi kondisi sosial adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial. Menurut Dalyono (2005:133), “Kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita”. Kondisi sosial masyarakat kalurahan Canden yang penuh kebersamaan, kegotong-royongan, kerjasama hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Nilai-nilai kekeluargaan masih dijunjung tinggi, sehingga setiap ada masalah yang muncul selalu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melalui musyawarah untuk mufakat. Selain itu, hubungan kekerabatan dan keterikatan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling membantu dan menolong baik dalam kesusahan maupun ketika masyarakat punya hajatan seperti kenduri/kondangan yang sering dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar islam maupun peringatan-peringatan hari besar lainnya. Selain hubungan kekeluargaan dan gotong-royong yang terjalin otomatis antar masyarakat. Dari hasil wawancara peneliti bersama Rita selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjelaskan mengenai kondisi kehidupan sosial masyarakat Kalurahan Canden.

“Kerjasama dan tolong menolong, rasa peduli di desa ini masih kuat. Urusan-urusan yang kita hadapi atau lakukan pasti dibantu oleh tetangga atau masyarakat umum jadi istilahnya urusan kita, urusan masyarakat juga misalnya persiapan untuk hajatan dan acara-acara lain”.

Berdasarkan kondisi ini, kita dapat memahami bahwa kehidupan sosial masyarakat Kalurahan Canden dengan nilai gotong-royong, kerjasama, rasa peduli tidak dapat dipisahkan dalam dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehidupan sosial yang kuat dan terjalin antar masyarakat

merupakan kearifan lokal sebagai bentuk kekayaan ciri khas dalam hidup berdesa dan bermasyarakat. Kehidupan sosial dengan nilai-nilai diatas merupakan hak asal-usul yang dimiliki masyarakat Desa yang merupakan warisan dan prakarsa lokal yang akan terus menghiasi kehidupan masyarakat ditengah perubahan zaman dan kemajuan tata kehidupan diberbagai bidang dengan didukung oleh berbagai macam komunitas yang ada di desa baik komunitas yang dibentuk oleh masyarakat setempat maupun komunitas yang dibentuk negara yakni: LPMD, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani dan Nelayan, kelompok arisan, dan kelompok kesenian sebagai kekuatan desa dalam memupuk dan merawat modal sosial.

Selain komunitas-komunitas diatas, masyarakat kalurahan Canden juga masih menjalankan berbagai kegiatan semangat gotong-royong atau dalam sebutan lokal Desa Canden yaitu sambatan seperti arisan, sambatan pembangunan rumah, sambatan pemeliharaan fasilitas umum yakni sarana dan prasarana, sambatan menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan, sambatan peristiwa kematian, menjaga kebersihan lingkungan, membangun jalan, membangun jembatan, membuat saluran air/irigasi, dan sambatan dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan. Komunitas-komunitas serta aktifitas yang telah dijelaskan diatas menguatkan ketahanan sosial masyarakat Kalurahan Canden. Ketahanan sosial atau dapat disebut juga kohesi sosial ini merupakan elemen penting dalam membina masyarakat Kalurahan canden saat ini dengan mencakup kerukunan, kegotongroyongan, kebersamaan, solidaritas sosial, dan toleransi yang telah dibuktikan dalam dinamika

komunitas maupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kalurahan Canden.

D. Kondisi Budaya

Kondisi budaya lokal dan kegiatan kemasyarakatan kalurahan Canden merupakan sebagai arena penyemaian modal sosial seperti: adat istiadat dalam perkawinan, kelahiran anak, upacara kematian, adat istiadat pengelolaan hutan, dan pengelolaan tanah pertanian. Kalurahan Canden juga memiliki Padukuhan khusus yakni Padukuhan Kralas sebagai Padukuhan yang menyediakan berbagai macam fasilitas budaya dengan berbagai macam jenisnya.

E. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian utama Kalurahan Canden adalah Sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang rata-rata adalah petani berjumlah 864 orang laki-laki dan 482 orang perempuan. Sektor pertanian merupakan sektor yang telah mengangkat perekonomian masyarakat Kalurahan Canden. Dalam menunjang kehidupan ekonomi, masyarakat Kalurahan Canden memiliki pertama, Lembaga Ekonomi yakni kelompok simpan pinjam berjumlah 2 kelompok. Kedua, usaha jasa pengangkutan berjumlah 15 (unit jasa). Ketiga, usaha jasa dan perdagangan yang terdiri dari pasar mingguan berjumlah 1 unit, toko kelontong sebanyak 43 unit, usaha peternakan berjumlah 152 unit, usaha perikanan berjumlah 36 unit, usaha perkebunan berjumlah 9 unit dan pengolahan kayu berjumlah 4 unit. Keempat, usaha jasa hiburan yaitu Group Musik/Band yang berjumlah 2 unit. Kelima,

usaha jasa gas, listrik, BBM, dan air yakni pengecar gas dan bahan bakar minyak berjumlah 22 unit dan keenam, usaha jasa keterampilan terdiri dari tukang kayu berjumlah 77 unit, tukang batu 334 unit, dan tukang jahit/bordir berjumlah 33 unit. Dalam kondisi tersebut, Kalurahan Canden masih memiliki penduduk miskin.

Tabel Data Penduduk Miskin Kalurahan Canden

No	Padukuhan	Jumlah (Orang)
1	Gadungan Kepuh	413
2	Gadungan Pasar	321
3	Jayan	289
4	Wonolopo	385
5	Kiringan	618
6	Ngibikan	646
7	Banyudono	618
8	Suren Kulon	449
9	Suren Wetan	610
10	Gaten	341
11	Beran	578
12	Plembutan	515
13	Canden	835
14	Kralas	717
15	Pulokadang	657
Total		7.992

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden tahun 2021

Berdasarkan data diatas, penduduk miskin kalurahan canden mencapai 7.992 orang. Padukuhan Canden merupakan padukuhan dengan penduduk miskin terbanyak dengan jumlah 835 orang, diikuti oleh padukuhan Kralas yakni berjumlah 717 orang, dan disusul padukuhan lainnya hingga penduduk miskin paling sedikit adalah padukuhan jayan yakni 289 orang.

F. Demografis Kalurahan Canden

Penduduk merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah wilayah. Dalam hal ini Kalurahan Canden yang merupakan penduduk atau pelaku, aktor yang mendiami suatu wilayah tertentu. Dengan demikian mendatangkan berbagai aktivitas baik berupa kepentingan pribadi maupun kepentingan umum lainnya yaitu pekerjaan, pendidikan, sosial, budaya, dan yang lainnya. Berdasarkan sisi sosiologi, penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografis dengan ruang tertentu. erjumlah 33 unit.

Tabel Data jumlah penduduk secara keseluruhan

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	5.955
2	Perempuan	6.397
Total		12.366

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kalurahan Canden pada tahun 2021 adalah 12. 366 jiwa dengan rincian 5.955 jiwa dan perempuan 6.397 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Canden adalah 4.044 KK.

Berdasarkan tabel diatas dapat dipastikan yang mendominasi adalah kaum hawa atau perempuan dari pada laki-laki.

G. Kepentingan Masyarakat

Kepentingan masyarakat dalam konteks ini mengenai hajat hidup orang banyak yakni kepentingan umum yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan/mata pencaharian, prasarana ibadah serta prasarana umum, prasarana komunikasi an informasi, dan Penyaluran Listrik Rumah Tangga. Hal ini merupakan sikap dan prilaku melayani dalam menjamin persamaan hak untuk mendapatkan atau memperoleh kebutuhan dasar yang disertai dukungan hukum dan nilai kemanusiaan.

1. Pendidikan

Undang-undang No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pendendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan penduduk, karena pada pembangunan desa sekarang ini sangat diperlukan partisipasi penduduk yang terampil untuk mmampu berpartisipasi penuh dalam pembangunan desa.

Drijarkara (2001) menjelaskan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal, dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani manusia agar mampu menunjukkan kualitas hidup yakni kehidupan yang sesuai dengan alamnya dan masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini berarti setiap elemen masyarakat berhak untuk memperoleh dan mengenyam pendidikan dan dilindungi oleh Undang-undang sebagai landasan kehidupan negara. Fasilitas pendidikan di Kalurahan Canden tergolong cukup memadai mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Lembaga Pendidikan Agama (LPA).

Tabel Jumlah fasilitas pendidikan Kalurahan Canden

No	Jenis	Jumlah (Unit)
1	TK	4
2	SD	5
3	LPA	3

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021

Berdasarkan tabel, jumlah fasilitas pendidikan di Kalurahan Canden cukup memadai. Fasilitas pendidikan tersebut terdiri dari TK

berjumlah 4 unit, SD berjumlah 5 unit, dan LPA berjumlah 3 unit. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menjadi wadah generasi Kalurahan Canden untuk mengenyam pendidikan dan memperoleh pengetahuan. Pendidikan sebagai satu hal yang menghasilkan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam berbagai kegiatan, dan diharapkan mampu melahirkan pikiran kritis dan kreatif dalam mengembangkan potensi atau sumber daya alam yang ada agar memperoleh hasil yang maksimal dan mampu mewujudkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyertakan tingkat sumber daya manusia Kalurahan Canden yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat secara umum.

Tabel Tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Perempuan	Laki-laki
1	Taman Kanak-kanak	52 orang	171 orang
2	Sekolah Dasar/ sederajat	1.437 orang	1.324 orang
3	SMP	1.551 orang	1.793 orang
4	SMU/SMA	493 orang	441 orang
5	Akademi/D1-D3	181 orang	135 orang
6	Sarjana	261 orang	248 orang
7	Pascasarjana S2	10 orang	16 orang
	Jumlah	3.985 orang	4.128 orang

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021

Berdasarkan data diatas Kalurahan Canden memahami pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Canden sangat berragam dan paling banyak yaitu SMP berjumlah 1793 orang, kemudian pada SD/ sederajat berjumlah 1324

orang, tingkat pendidikan SMA/SMU berjumlah 441 orang, Sarjana berjumlah 248 orang, Taman kank-kanak 171 orang dan yang paling kecil jumlahnya adalah pascasarjanaS2 yaitu berjumlah 16 orang. Pendidikan Kalurahan Canden dimulai dari taman kanak-kanak, hal ini merupakan terobosan yang efektif bagi perkembangan generasi muda untuk lebih mempersiapkan diri mengenyam pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan generasi lokal yang berkualitas baik dari sisi akademis maupun karakter.

Tabel Lulusan Sekolah Khusus

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	SLB A	-	3 orang
2	SLB B	3 orang	-
	Jumlah	3 orang	3 orang

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021

Pendidikan khusus merupakan wadah bagi masyarakat Kalurahan Canden yang mempunyai proses yang berbeda dan memperoleh kesempatan dan ruang sesuai dengan kondisi fisik dan keterampilannya masing-masing serta strategi pembelajaran yang berbeda. Kalurahan Canden memiliki SLBA dan SLBB. SLB A merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunanetra yang memiliki hambatan pada indra penglihatan berjumlah 3 orang. SLB B merupakan merupakan sekolah yang diperuntuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kekurangan dalam indra pendengaran atau tunarunggu berjumlah 3 orang.

Tabel Tidak Lulus dan Tidak Sekolah

No	Jenis	Jumlah
1	Tidak Lulus	1.618 orang
2	Tidak Sekolah	261 orang

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021

Kalurahan Canden memiliki warga yang tidak lulus sekolah dan tidak sekolah meskipun jumlahnya lebih sedikit dari warga yang mengenyam pendidikan.

Tabel Prasarana Pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	Gedung TK	4 buah
2	Gedung SD	5 buah
3	Gedung Lembaga Pendidikan Agama	3 buah
4	Perpustakaan Desa	1 buah

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021.

Prasarana pendidikan kalurahan Canden merupakan wadah untuk mempersiapkan generasi baru Kalurahan Canden dalam mengenyam pendidikan yang layak dan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan berilmu. Prasarana pendidikan ini tentunya adalah harapan dalam membenahi bidang pendidikan Kalurahan Canden yang adalah kebutuhan dasar agar dapat belajar dengan nyaman dan aman.

Berdasarkan klasifikasi diatas, Kalurahan Canden telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan dan peduli atas pendidikan. Dengan kesadaran yang ada Kalurahan telah memberikan kesempatan dan akses bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan baik akses sekolah

yang formal maupun sekolah yang dilaksanakan sesuai kondisi fisik masyarakat. Namun belum ada prasarana khusus bagi masyarakat yang memiliki kondisi fisik tertentu dalam hal ini adalah gedung namun akses dan kesempatan telah diberikan. Hal tersebutlah bukan menjadi sesuatu penghambat bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan meskipun Kalurahan masih perlu berupaya agar prasarana desa disediakan secara lengkap dan dengan adanya perpustakaan desa diharapkan semua elemen masyarakat mampu mengakses ilmu pengetahuan dalam ruang yang lebih luas.

2. Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan pokok masyarakat dalam berdesa maupun dalam pelaksanaan kehidupan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan prasarana tertentu untuk menunjang kebutuhan pokok ini. Kalurahan Canden memiliki prasarana dan sarana khusus bagi kesehatan masyarakat diantaranya Poskesdes berjumlah 1 buah dan UKBM (Posyandu/polindes) berjumlah 16 buah, Apotik berjumlah 1 buah yang disertai Dokter umum berjumlah 1 orang, Paramedis berjumlah 2 orang, Bidan berjumlah 6 orang, Perawat 1 orang dan dukun bersalin terlatih berjumlah 3 orang.

3. Pekerjaan/ Mata Pencaharian

Pekerjaan/ mata pencaharian masyarakat Kalurahan Canden sangat berragam namun saat ini didominasi oleh Petani sehingga secara umum masyarakat mempertahankan hidup dengan

memanfaatkan lahan dengan bertani. Berikut disajikan mata pencaharian masyarakat kalurahan Canden.

Tabel Mata Pencaharian Kalurahan Canden

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	1.346
2	Buruh Tani	1.023
3	Buruh Migran	126
4	Pegawai Negeri Sipil	229
5	Pengrajin	40
6	Pedagang Barang Kelontong	85
7	Peternak	234
8	Montir	21
9	Dokter Swasta	2
10	Perawat Swasta	10
11	Bidan Swasta	7
12	Ahli Pengobatan Alternatif	1
13	TNI	32
14	POLRI	60
15	Pengusaha kecil, Menengah, dan Besar	40
16	Guru Swasta	45
17	Dosen Swasta	1
18	Karyawan Perusahaan Swasta	205

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021

Uraian diatas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan di Kalurahan Canden didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi andalan masyarakat karena merupakan lingkungan dengan basis pertanian. Selain petani yang mendominasi

terdapat juga buruh tani. Hal ini menandakan luas tanah atau lahan yang dimiliki oleh Kalurahan Canden belum memadai sehingga masyarakat banyak yang tidak memiliki tanah untuk dikelola dan memilih menjadi buruh tani. Buruh Migran, Pegawai Negeri Sipil, Pengrajin, Pedagang Barang Kelontong, Peternak, Montir, Dokter Swasta, Perawat Swasta, Bidan Swasta, Ahli Pengobatan Alternatif, TNI, POLRI. Pengusaha kecil, Menengah, dan Besar, Guru Swasta, Dosen Swasta, dan Karyawan Perusahaan Swasta merupakan masyarakat yang memiliki bagian kehidupan yang berbeda mewarnai mata pencaharian masyarakat di Kalurahan Canden.

H. Prasarana Ibadah dan Umum

Prasarana ibadah dan umum ini merupakan pertama, tempat masyarakat Kalurahan Canden melaksanakan ibadah dalam keadaan nyaman. Keberadaan tempat ibadah mendukung kehidupan rohani masyarakat kalurahan Canden. Kedua, prasarana umum digunakan sebagai tempat bersantai bagi masyarakat dengan berolahraga, melihat sekaligus melestarikan adat istiadat (budaya) yang telah turun-temurun oleh para leluhur, air sebagai sumber pokok kehidupan, ruang berkumpul/pertemuan yang digunakan untuk musyawarah bagi kepentingan bersama.

Tabel Prasarana Ibadah

No	Jenis	Jumlah (Buah)
1	Masjid	32
2	Surau/Mushola	24
3	Gereja	1

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021

Tempat-tempat ibadah ini disediakan agar masyarakat mampu bertakwa dan menjalin hubungan rohani yang erat dengan Tuhannya yang dipercaya sehingga Masjid, Mushola, dan Gereja dapat digunakan masyarakat dengan nyaman dan aman.

Tabel Prasarana umum

No	Jenis	Jumlah (Buah)
1	Olahraga	10
2	Balai Pertemuan	9
3	Sumur Desa	1
4	Pasar Desa	2

Sumber: Buku Monografi kalurahan Canden 2021

Prasarana umum merupakan tempat umum bagi masyarakat Kalurahan Canden dan menyangkut kepentingan bersama untuk hajat hidup orang banyak. Hal ini membuktikan kesiapan desa dalam menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti kebutuhan masyarakat memperoleh air bersih, Kalurahan menyediakan sumur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memenuhi air (misalnya memasak, minum, dan lainnya), lapangan bola sebagai tempat untuk berolahraga agar masyarakat dapat hidup sehat dan produktif, dan pasar sebagai tempat masyarakat membeli dan memperoleh kebutuhan sehari-hari serta balai pertemuan sebagai

tempat menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai makhluk yang berkepentingan dan berpolitik. Dari tabel diatas terlihat prasaranan umum Kalurahan Canden cukup memadai dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya dengan fasilitas olahraga berjumlah 10 buah. Balai pertemuan berjumlah 9 buah,, sumur desa berjumlah 1 buah, dan pasar desa sebagai pusat jual-beli masyarakat untuk menyambung hidup berjumlah 2 buah.

1. Prasarana Komunikasi dan Informasi

Tabel Prasarana Komunikasi dan Informasi

No	Jenis	Keterangan
1	Telepon	Ada
2	Kantor Pos	Ada
3	Radio	Ada-1900
4	Tv	Ada-1245

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021

Prasarana komunikasi dan informasi merupakan salah satu kepentingan masyarakat kalurahan Canden. Masyarakat Kalurahan Canden memiliki kebutuhan informasi setiap harinya untuk menunjang pengetahuan serta melahirkan sikap waspada pada sebuah kondisi yang terjadi diwilayah yang lain. Prasarana komunikasi juga dibutuhkan, masyarakat adalah makhluk sosial yang membutuhkan teman sejawat untuk menjalankan kehidupan sehingga membutuhkan alat komunikasi. Tabel diatas menunjukkan terdapat telpon dan kantor pos yang menunjang fasilitas informasi dan komunikasi masyarakat, radio, dan juga tv yang dapat menyediakan informasi bagi masyarakat.

2. Prasarana Air Bersih

Tabel Prasarana Air Bersih

No	Jenis	Jumlah (Unit)
1	Sumur Pompa	28
2	Sumur Gali	2250

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Canden 2021

Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kalurahan Canden. Berdasarkan tabel diatas, Kalurahan canden memiliki sumber air bersih yang memadai.. Hal tersebut dapat dilihat dari persediaan fasilitas air bersih yang terdiri dari sumur pompa berjumlah 28 unit dan sumur gali berjumlah 2250 unit.

3. Penyaluran Listrik Rumah Tangga

Kalurahan Canden terletak kurang lebih 15 km ke utara dari pusat Kota Yogyakarta. Masyarakat yang menyalur listrik rata-rata menggunakan daya sebesar 450 kWh dan 900 kWh. Sebagian besar masyarakat menyalur listrik setelah gempa Yogyakarta pada tahun 2005 dan ada juga masyarakat yang memang pada saat mendirikan rumah sudah menyalur listrik ke rumah tetangga terdekat. Masyarakat menikmati listrik dengan cara menyalur menggunakan alat elektronik seperti lampu, televisi dan kipas. Kendala yang dihadapi masyarakat selama menyalur listrik adalah tegangan yang turun. Ada pula masyarakat yang tidak mengalami kendala tersebut karena pemakaian alat elektronik yang tidak terlalu banyak dan pemasangan daya warga yang menyalurkan listrik tergolong besar.

I. Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga-lembaga yang ada di Kalurahan canden memiliki tupoksinya masing-masing dan tentu memiliki kontribusi dalam membangun dan memajukan Kalurahan Canden. Lembaga desa ini bertujuan membangun hubungan dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam menata dan melihat perkembangan tata kehidupan masyarakat.

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalurahan canden merupakan Lembaga Desa (LD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Canden dan atau biasa disebut juga MUSKAL (Musyawarah Kalurahan). Secara keanggotaan, BPD Desa Canden merupakan wakil dari masyarakat kalurahan canden sendiri berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD Kalurahan Canden terdiri dari golongan profesi, pemuka agama, dan atau tokoh masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD Kalurahan canden adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pengurus BPD Kalurahan canden berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 4 (empat) anggota lainnya. Dalam mengawali menjalankan tugas dan fungsinya, BPD diresmikan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati serta mengucapkan sumpah/ janji dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

Ketua BPD Kalurahan Canden dipilih secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Dalam Pemerintahan BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga memiliki kewenangan yakni pertama, membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa. Ketiga, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Keempat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, dan kelima, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan Canden.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LPMD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. LPMD kalurahan canden beranggotakan 15 orang.

3. Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa)

PKK adalah gerakan pembangunan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat Kalurahan Canden menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu. Dalam

menggerakkan program-programnya PKK Kalurahan Canden dikelola oleh pengurus yang berjumlah 18 orang.

4. Badan Usaha (BUM Des) Milik Kalurahan Canden

Desa adalah unit pemerintah terkecil, terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Sebagai pemerintahan terkecil, terdepan dan paling dekat dengan masyarakat Desa dapat melihat dan mendengarkan secara langsung permasalahan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kedekatan pemerintahan desa dengan masyarakat dapat mempermudah menyelesaikan persoalan, mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian, desa dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kalurahan Canden memiliki BUMDesa atau biasa disebut Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) namun saat ini belum BUMKal tidak dikelola dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Dukuh Kiringan dalam wawancara bahwa:

“BUMDesa sempat mati suri pada saat baming Opak Asri dibentuk sampai sekarang pun belum ada pergerakan. Mungkin kurang kemampuan personilnya bahkan dulu pernah melakukan studi banding berharap akan ada perubahan setelah itu pun personil BUMDesa ga ada perubahan malah semakin semput”.

Ibu Sudiyatmi selaku Ibu Dukuh Padukuhan Kiringan menyampaikan keluhan kesahnya terhadap Pengurus BUMDesa kalurahan Canden. Beliau menyampaikan bahwa telah dilaksanakan kegiatan studi banding ke salah satu BUMDesa yang usahanya telah terbilang maju

namun tidak ada hasil maupun perubahan atau sekedar gebrakan baru yang dilakukan oleh Pengurus BUMDesa Kalurahan Canden. Kegiatan studi banding yang dilakukan terbilang sia-sia karena tidak menghasilkan perubahan dalam dinamikanya pada hal pembentukan Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu usaha untuk menggerakkan perekonomian desa seperti yang tertera dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk membentuk suatu badan Usaha Milik Desa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Dengan adanya BUMDesa, sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama.

5. Rukun Tetangga (RT)

RT adalah lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) yang merupakan bentuk guyub rukun masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong. Kalurahan Canden memiliki 76 RT. Dalam menjalankan tugasnya RT Kalurahan Canden memiliki fungsi antara lain; pertama, pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya. Kedua, pemelihara ketertiban, keamanan, dan kerukunan hidup antar warga. Ketiga, pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi murni masyarakat dan keempat, penggerak gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

6. Karang Taruna

Karang taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang membantu Pemerintah Desa menjalankan tugas dan fungsi dan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi dan semangat gotong-royong pemuda desa. Karang Taruna Kalurahan Canden bernama Karang taruna Wiratama dengan pengurus berjumlah 51 orang yang terdiri dari Padukuhan-padukuhan yang terdapat di Kalurahan Canden. Karang Taruna Wiratama memiliki fokus pada beberapa bidang diantaranya *pertama*, kerohanian. Bidang kerohanian bergerak dalam pengembangan kerohanian yang diwujudkan dalam kegiatan pengajian karang taruna, lomba ramadan, sagfari ramadan, dan lomba keagamaan keagamaan online dimasa pandemi. *Kedua*, pendidikan. Dalam bidang pendidikan karang taruna bergerak dalam pengembangan pendidikan masyarakat dengan kegiatan bimbingan belajar dan pembuatan video hari pendidikan. *Ketiga*, seni budaya dan olahraga. Bidang seni budaya dan olahraga bergerak dalam pengembangan seni budaya dan olahraga dengan kegiatannya sepeda bersama dan latihan rutin badminton. *Keempat*, sosial masyarakat. Bidang sosial masyarakat bergerak dalam pengembangan dan kepedulian terhadap sesama masyarakat dengan kegiatannya bakti sosial karang taruna, berbagi takjil, pembagian beras komunitas berbagi beras. *Kelima*, Huminfo. Bidang Huminfo bergerak dalam pengembangan hubungan dengan masyarakat dengan kegiatan pembuatan video hari jadi kalurahan dan pengurusan media sosial karang taruna dan *keenam*, sumber daya

manusia. Bidang terakhir ini yakni sumber daya bersama bergerak dalam pengembangan sumber daya pengurus karang taruna dan masyarakat luar dengan kegiatannya yakni *outbond* karang taruna dan regenerasi karang taruna.

J. Potensi Kalurahan Canden

1. Peternakan

Kalurahan canden memiliki potensi salah satunya adalah peternakan. Dalam bidang peternakan, Kalurahan Canden memiliki jenis hewan antara lain sapi, kambing, ayam , enthok, dan bebek. Bidang peternakan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dengan menjual ternak tersebut.



Cattle groups (Doc. Anonymous)

2. Pasar Bendo

Pasar bendo adalah pasar tradisional yang terletak di dusun Gadungan pasar Kalurahan Canden kecamatan jetis. Pasar Bendo merupakan tempat bagi masyarakat menjalankan aktivitas jual beli sumber daya alam yang ada untuk memperoleh pendapatan sebagai upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan.



3. Jamu Tradisional

Keberadaan 120 orang peramu dan penjual jamu tradisional secara berkeliling di Dusun Kiringan membuat eksistensi jamu tradisional semakin berkembang dan maju. Jenis jamu yang ditawarkan memiliki ragam jenis baik cair maupun instan seperti : beras kencur, kunir asem, galian singset, cabe puyang, uyup-uyup, jamu sirih dan purwoceng dengan manfaat tersendiri. Menariknya terdapat rencana pembuatan jamu untuk perawatan kulit tertentu.



4. Wisata Air dan Pemandangan Bendung Tegal

Wisata air di bendungan Tegal selama ini sudah cukup dikenal dengan adanya acara rutin Pek Cun pada bulan Mei. Acara budaya yang berbau keagamaan tersebut, sering juga diikuti dengan lomba perahu naga. Terlepas dari kegiatan lomba,

perahu-perahu yang ada di sana, dapat saja digunakan untuk wisata air sambil menikmati indahnya alam desa. Kondisi bendungan Tegal yang tidak terlalu dalam dan tenang, ideal sekali untuk berperahu santai buat *refreshing* keluarga.



5. Makanan Tradisional

Makanan kuliner yang banyak terdapat di dusun Wonolopo dan Bulusan juga menjadi daya tarik tersendiri. Di dua dusun ini banyak terdapat pembuat gatot, tiwul, onde-onde yang terbuat dari ketan, berisi bumbu kacang hijau yang bagian luarnya dilumuri wijen serta ukel yang juga terbuat dari ketan dan wedang uwuh.



6. Kesenian

Potensi kesenian , banyak terdapat di dusun Kralas dengan adanya kelompok ketoprak, jatilan, srandul, sholawatan, kerawitan dan sinden (terdapat 40 penyinden) serta wayang kulit. Perlu Diketahui pula bahwa masing-masing jenis kesenian

tersebut banyak peminatnya. Secara berkala sering diadakan latihan berbagai jenis kesenian tradisional ini. Sehingga jenis-jenis kesenian tadi, setiap saat siap dipentas.

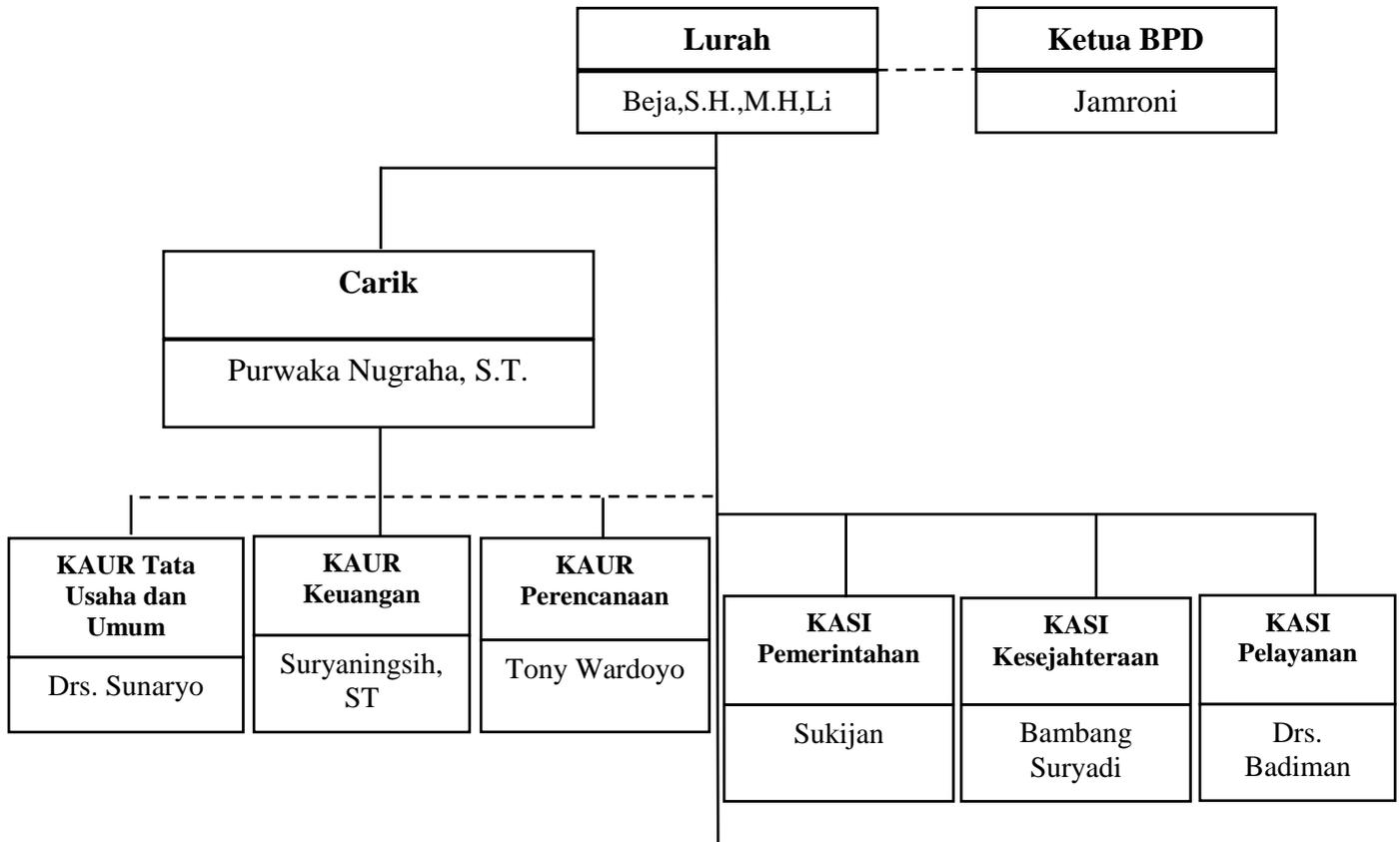


7. Kerajinan Kulit

Adanya kerajinan kulit di Jagan dan Ngibikan yang memproduksi jaket kulit, tas, dompet dan sabuk kulit serta berbagai asesoris dari kulit, menambah kasanah potensi wisata bagi para pengunjung yang datang ke Desa Canden.



Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Canden



Kepala Dukuh Pulokadang	Rizha Utami
Kepala Dukuh Kralas	Widodo
Kepala Dukuh Canden	Kurniawan Setiabudi
Kepala Dukuh Plembutan	Sumardiono
Kepala Dukuh Gaten	Elisabeth Emi Puryanti
Kepala Dukuh Beran	Supriyono
Kepala Dukuh Suren Wetan	Giri Tri Haryadi
Kepala Dukuh Suren Kulon	R. Agung Sudarto
Kepala Dukuh Gadungan Kepuh	Diyan Purnomo
Kepala Dukuh Gadungan Pasar	Arif Winarto
Kepala Dukuh Banyudono	Eka Ismiyanto, AMd.T, STr.Kom
Kepala Dukuh Wonolopo	Rohgiyanto
Kepala Dukuh Ngibikan	Suharyanto
Kepala Dukuh Kiringan	Dra. Sudyatmi
Kepala Dukuh Jayan	Dwi Nurrohmat

Keterangan:

Garis Komando —————

Garis Koordinasi - - - - -

K. Visi Misi Kalurahan Canden

Visi Kalurahan Canden merupakan cita-cita yang sangat besar untuk diraih dan diwujudkan dalam 6 (enam) tahun periode pembangunan jangka menengah Desa. Visi inilah yang menjadi acuan semua program pembangunan dan kegiatan-kegiatan Kalurahan Canden selama 6 (enam) tahun. Visi kalurahan Canden bukanlah sekedar visi dari Lurah yang terpilih namun merupakan visi dan harapan seluruh masyarakat Kalurahan Canden.

Visi

“Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Bertanggungjawab untuk Mewujudkan Masyarakat Desa Canden yang Sejahtera, Aman, Nyaman, Berbudaya, terampil, Agamis, dan Berkeadilan, dan menuju Canden yang lebih Baik”.

Misi

Visi Kalurahan Canden diturunkan kedalam misi yakni *pertama*, mendorong kesadaran dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi desa yang edukatif dan agamis. *Kedua*, mendorong kesadaran dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi desa yang aman, nyaman, normatif, dan berbudaya. *Ketiga*, mendorong kesadaran dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi desa yang bersih, sehat, dan hijau. *Keempat*, meningkatkan kesadaran dan peran serta aparat pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, dalam rangka mewujudkan kondisi desa yang

makmur dan berkeadilan. Dan kelima, melakukan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006, *Pembangunan Pedesaan dan perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dalyono, 2005. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Dewi Citra Larasati dan Ya'taufiq Kurrahman. 2019. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9 No 2.
- Cooper, C. John Flechter, David Gilbert dan Stephen Wanhill. 1993. *Tourism: Principles and Practice*. London: Pitman Publishing.
- Eko Sutoro. 2014, *Desa membangun Indonesia*, YOGYAKARTA: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko Sutoro, M. Barori dan Hastowiyono. 2017, *Desa Baru Negara lama*, Yogyakarta: PASCASARJANA STPMD "APMD".
- Gunawan, Imam. 2017, *Metode penelitian Kualitatif; Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, Hani. T. 2015, *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hardin G. 1968. *Tragedy Of The Commons*, Journal Science Vol 162 No 3859.
- Hunger J. Dafid dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*, ANDI: Yogyakarta.
- Lang, Robert T dan Steven P. Hornburg. 1998. *What Is Social Capital and Why Is It Important to Public Policy*, Housing Policy Debate Vol 9.

- Malani Lexy Febrison, Selvie M. Tumengkol dan Juliana Lumintang. 2021. *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara*, Journal of Social and Culture Vol 14 No 1.
- Nursidah, Nugroho, B., Darusman, D., Rusdiana, O., dan rasyid, Y. 2012. *Pengembangan Institusi untuk membangun aksi kolektif lokal dalam pengelolaan hutan kawasan lindung Swp DAS Arau, Sumatera Barat*. Jurnal Manajemen. Hutan Tropika, XVIII (1), 18-30.
- Ostrom E. 1990. *Governing The Commons; The Evolution Of Institutions For Collective Action*, New York: Cambridge University Press.
- Sahdan Gregorius. 2019, *Desa Kuat Negara berdaulat*. Yogyakarta: The Indonesia Power Democracy (IPD).
- Sidik, Fajar. 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol 19 No 2.
- Soleh, Ahmad. 2017. *Strategi Pengembangan Potensi Desa*, Jurnal Sungkai Vol 5 Hal: 32-52.
- Satia, R., Isnadi, Y., dan Retnandari, N. D. 2016. *Common Pool Resources Of Lake Takapan*. Journal Of Invironmental Sciece, 5.
- Undang-undang 1945 Alinea 4.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wade R. 1997. *Manajemen Sumber Daya Properti Bersama: Tindakan Kolektif Sebagai Alternatif Privatisasi Atau Peraturan Negara*, Cambridge Journal Of Economics 1987, 11: 95-106.
- Wikipedia. Org (id.m. wikipedia.org).

<https://canden.bantulkab.go.id/first/kategori/19>